



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH
DALAM PERSPEKTIF FIQIH MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
pada Jurusan Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah (M/ HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Disusun Oleh :
MUHAMAD YUSUP SUPRIYATNA
NIM 14112210096

**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2015 M/ 1436 H**



ABSTRAK

MUHAMAD YUSUP SUPRIYATNA. NIM. 14112210096 : “KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus di Desa Jutikebon Kabupaten Indramayu)”. Skripsi 2015.

Desa Jutikebon merupakan Desa yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Namun dalam kenyataannya diantara masyarakat ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), akan tetapi tidak mampu mengolahnya (menggarapnya), ada pula di antara masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya. Oleh karena itu keduanya melakukan kerjasama untuk mengolah lahan tersebut. Sebagian besar masyarakat Jutikebon adalah penganut mazhab Syafi’i, namun apabila dikaitkan dengan kerjasama penggarapan sawah, ada kesenjangan antara praktik dan teori dari hukum fiqih muamalah Mazhab Syafi’i.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jutikebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum fiqih Mazhab Syafi’i terhadap praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Jutikebon Kabupaten Indramayu.

Sistem kerjasama penggarapan sawah diatur oleh aturan hukum fiqih muamalah yang dituntun oleh mazhab yang didalamnya berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Hadits. Dalam prakteknya sistem kerjasama penggarapan sawah di Desa Jutikebon seharusnya bertumpukan kepada aturan fiqih muamalah mazhab Syafi’i, disamping terpengaruhi oleh hukum adat, hal itu dikarenakan mereka (masyarakat Desa Jutikebon) menganut mazhab Syafi’i. selanjutnya praktek kerjasama penggarapan sawah ini yang telah terpengaruhi oleh hukum adat dikaji dan di tinjau menurut perspektif mazhab Syafi’i.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara, observasi langsung, dokumentasi dan analisa terhadap kitab-kitab fiqih.

Setelah menganalisis kerjasama penggarapan sawah yang ada di Desa Jutikebon, dapat diperoleh hasil bahwa dilihat dari segi pelaksanaan akad, pembagian hasil serta berakhirnya akad, kerjasama *maro* dan *mertelu* di Desa Jutikebon sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat hukum fiqih mazhab Syafi’i, oleh karena itu dianggap sah dan diperbolehkan. Namun, ada kesenjangan dalam kerjasama *mercuma*, didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pembagian hasilnya yang bisa merugikan salah satu pihak. Meskipun kerjasama tersebut telah menjadi adat kebiasaan, apabila dikaitkan dengan kaidah fiqih “*Al-Ādatu muhakkamah*” sistem kerjasama ini tetap tidak bisa dijadikan sebagai suatu hukum yang memperbolehkannya kerjasama tersebut karena tidak sesuai dengan aturan syarat ‘*urf*’ yang bisa dijadikan sebagai hukum.

Kata kunci : *Maro, Mertelu, Mercuma, Sawah, Adat*



ABSTRACT

MUHAMAD YUSUP SUPRIYATNA. NIM. 14112210096: “THE COOPERATION OF RICE’S CULTIVATION IN PERSPECTIVE OF FIQIH SYAFI’I (A Study Case at Juntikebon in Indramayu Regency District)”. Thesis 2015.

The majority of Juntikebon district are farmers. In fact, many of citizens has a rice fields, but unable to work on it and a half of them are contrary. Therefore, both of them work on the fields together. The majority of Juntikebon are follow mazhab Syafi’i, but if related in the cooperation of rices cultivation, there is a gap in practice and theory of mazhab Syafi’i.

The research was conducted in Juntikebon district. The aim of the research are to know the view of mazhab Syafi’i towards the cooperation of rice’s cultivation at Juntikebon in Indramayu regency.

The cooperation of rice’s cultivation system govern by fiqih law taken from Al-Qur’an and Hadits. Practically, the system should be refers to fiqih in mazhab Syafi’i. In addition, they mixed by traditional law. So, the traditional law was considered and inspected based on mazhab Syafi’i perspective.

This research was qualitative used descriptive-analysis approach. This research used to reveals, describe and explain the problem objectively. The technic of collecting data used interview, fields observation, documentation and analysis towards the books of fiqih.

After analyzing of entire system, in Juntikebon district could be obtained the implementation of contract (akad). The distribution of harvest, the cooperation of *maro* and *mertelu* in Juntikebon appropriated in mazhab Syafi’i, therefor, entire system was legal. However, *mercuma* system has a gap, it contains uncertainly and unfairness in the distribution of harvest which prejudice, other party although *mercuma* system has become the tradition law, if related to fiqih law "*Al-Ādatu muhakkamah*" such system could be a reverence in fiqih as a law due to contradicted "*urf*" condition.

Keyword: *Maro, Mertelu, Mercuma, Rice field, Custom.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul *“Kerjasama Penggarapan Sawah dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu)”*, oleh Muhamad Yusup Supriyatna NIM 14112210096, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 4 Agustus 2015.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada jurusan Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 4 Agustus 2015


Sidang Munaqasah

Ketua



H. Juju Jumena, SH., MH.
NIP. 19720514 200312 1 003

Sekretaris



Eep Saefullah, M.Ag.
NIP. 19760312 200312 1 003

Anggota,

Penguji I,



Dr. H. Ujang Syafrudin, MA.
NIP. 19570909 198303 1 003

Penguji II,



Ahmad Rofii, MA. LL.M
NIP. 19760725 200112 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Pembatasan Masalah	8
3. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metodologi Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Sumber Data Penelitian	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II MODEL PENGGARAPAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Konsep <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> dalam Perspektif Fiqih Islam.....	19
1. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	19
a. Pengertian <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	19
b. Landasan Hukum <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	22
2. Rukun, Sifat dan Syarat-syarat <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	25
a. Rukun dan Sifat <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	25
b. Syarat-syarat <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	25
3. Bentuk-Bentuk Akad <i>Muzara'ah</i> atau <i>Mukhabarah</i>	29
4. Hukum-hukum <i>Muzara'ah</i> yang <i>Shahih</i> dan <i>Fasid</i>	30
5. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i>	31
B. Konsep <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> dalam Perspektif Mazhab Syafi'i	32
1. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	32
a. Pengertian <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	32
b. Landasan Hukum <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	35
2. Rukun dan Syarat-syarat <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> ..	43
3. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i> atau <i>Mukhabarah</i>	43

BAB III PRAKTIK KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA JUNTIKEBON KABUPATEN INDRAMAYU

A. Kondisi Objektif Desa Juntikebon	45
1. Letak Geografis	45
2. Keadaan Penduduk	46
3. Keadaan Pendidikan	47
4. Keadaan Ekonomi	49



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Kehidupan Beragama	54
6. Kondisi Sosial dan Budaya	54
B. Pelaksanaan Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah.....	56
1. Perjanjian <i>Maro</i>	58
2. Perjanjian <i>Mertelu</i>	58
3. Perjanjian <i>Mercuma</i>	59

BAB IV PERSPEKTIF FIQIH MAZHAB SYAFI'I TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN SAWAH DI DESA JUNTIKEBON KABUPATEN INDRAMAYU DALAM

A. Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Sawah di DesaJuntikebon	60
1. Perjanjian <i>Maro</i>	60
2. Perjanjian <i>Mertelu</i>	64
3. Perjanjian <i>Mercuma</i>	69
B. Perspektif Mazhab Syafi'i terhadap Akad Perjanjian Sawah di Desa Juntikebon	73
1. Dilihat Segi Pelaksanaan Akad Perjanjian	74
2. Dilihat dari Segi Sistem Bagi Hasil.....	83
3. Dilihat dari Jangka Waktu Perjanjian.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah*.

Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamalah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.¹

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Secara geografis Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan ini dilewati barisan pengunungan dunia. Hal ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia sangat subur. Kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan pertanian. Itulah mengapa selain disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri,

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), 278.

atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. *Muzāra'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhābarah* pun tidak jauh berbeda dengan *muzāra'ah*, perbedaanya hanya dalam pengeluaran modal benih, *mukhābarah* benih berasal dari petani penggarap.

Seperti halnya *mudhārabah*, merupakan bentuk kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yakni, pemilik modal (*shāhib al māl*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha (*muḍārib*) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.

Pada hakekatnya muazara'ah sama dengan *mudhārabah* karena keduanya merupakan kerjasama (*partnership*) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah (penggarap). Dalam hal ini pemilik tanah adalah shahib al maal karena ia memberi kontribusi tanah (dianalogikan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah *muḍarib* karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga.

Sistem *Muzāra'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem Ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah biasa memperoleh bagian dari hasil (*Muzāra'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak



banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan tanamannya.²

Dalam konsep Imam Syafi'i, *Muzāra'ah* tergolong dalam dua katagori hukum, yakni *Muzāra'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. *Muzāra'ah* yang diperbolehkan adalah penyerahan ladang beserta tanamannya (kurma) oleh pemilik lahan/ladang, kemudian pemilik lahan memberi izin pada penggarap untuk menanam kurma diantara celah-celah pohon yang telah ada, dan penyiramannya mengikuti air yang mengalir pada pohon yang telah ada. Dan penggarap berhak atas buah dan ranting kurma yang ditanam sendiri. Jadi *Muzāra'ah* yang diperbolehkan adalah apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Jadi akad *Muzāra'ah* ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *Musaqah* (sewa tenaga).³

Kemudian *Muzāra'ah* yang tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i adalah apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kosong tanpa ada tanaman didalamnya, kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain, kemudian pembagiannya 1/4 dan 1/3 atau sebagian dengan sebagian (separo-separo). Jadi kerjasama semacam ini tidak diperbolehkan karena modal tidak seimbang, yakni pemilik hanya menyerahkan tanah kosong, kemudian bibit dan perawatan dari penggarap, sementara hasilnya dibagi 1/2 - 1/2 (fifty-fifty) atau sebaliknya pemilik tanah menanggung bibit dan perawatan tanah. Cara seperti ini tidaklah adil.⁴

Oleh sebab itu Imam Syafi'i melarang adanya *Muzāra'ah*, karena modal tidak imbang/tidak adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil.⁵

Pada prinsipnya praktik *muzāra'ah* antara pemilik tanah dan penggarap lazim terjadi pada masa Rasulullah, dan Rasulullah sendiri tidak

² Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 130.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1272.

⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* (Mesir: Dar alFikr), Juz III, 230.

⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam* (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960), Juz III, 79.



menyetujuinya. Pernyataan Nabi yang semacam ini seharusnya tidak diinterpretasikan dengan maksud bahwa Nabi SAW menyatakan tidak sah atas praktik tersebut.

Pelarangan tersebut hanya berhubungan dengan perolehan sejumlah bagian yang istimewa bagi salah satu pihak, sementara pihak yang lain dirugikan. Praktik semacam inilah yang dilarang karena terdapat unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain.

Syariat islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai.⁶

Dalam keyataannya dalam dunia pertanian, diantara anggota masyarakat ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), akan tetapi tidak mampu mengolahnya (menggarapnya), hal tersebut kemungkinan terjadi karena luasnya lahan yang tidak akan sanggup dikelola sendiri, atau karena adanya kesibukan dengan kegiatan lain serta tidak adanya keahlian (skill, keterampilan) dalam bertani. Sebaliknya, ada pula di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

Melihat kenyataan ini, pemilik lahan bekerjasama dengan penggarap dengan menyerahkan lahannya untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian, rasa tolong-menolong, saling

⁶ hadits Nabi SAW :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةِ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (H.R. Ibnu Majjah)



memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendapat ini sesuai dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah : 2)*

Melalui ayat ini, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk saling membantu satu sama lain, serta tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketaqwaan. Sebaliknya, Allah melarang kita untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Salah satu bentuk kongkrit dari tolong-menolong adalah dengan melakukan kerjasama yang didalamnya saling membantu untuk kepentingan dan saling menguntungkan satu sama lain, karena dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam kerjasama yang dilakukan sesama manusia dibutuhkan sebuah kesepakatan, dan kesepakatan tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk perikatan.

Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (*syirkah*) antara dua pihak, salah satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lainnya sebagai penggarap yang bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.⁷

Setiap perikatan/ perjanjian (kerjasama/ transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan aturan syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain. Begitu juga dalam pertanian yang dalam konteks ini adalah penggarapan lahan sawah. Bentuk sistem kerjasama penggarapan sawah yang dipakai oleh masyarakat yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat harus

⁷ Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam* (Bandung : Kiblat Umat Press, 2002), 334.



sesuai dengan syariat Islam. Sama halnya dengan sistem kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon yang kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani.

Ada beberapa sistem kerjasama pengolahan sawah yang dipakai di Desa Juntikebon, mulai dari sewa, gadai dan bagi hasil. Namun yang banyak digunakan adalah sistem bagi hasil. Sistem tersebut adalah suatu jenis kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan dengan menyerahkan lahan pertanian untuk digarap oleh pihak penggarap. Dalam hal ini, penggarap menerima lahan tersebut untuk digarap dengan konsekuensi hasil yang dicapai.

Sistem bagi hasil yang sering dipakai di Desa Juntikebon ada tiga macam, yaitu *maro*, *mertelu* dan *mercuma*. Ketiga sistem bagi hasil ini yang sering dipakai di Desa Juntikebon.

Dalam kerjasama dengan sistem *maro*, pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu. Di dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan penggarap dapat memulai melakukan penggarapan lahan tersebut, serta ditentukannya waktu berakhirnya penggarapan. Pihak penggarap boleh melakukan penggarapan sampai batas waktu yang ditentukan atau sampai panen pada batas waktu terakhir jika pada menjelang batas waktu belum panen. Dalam perjanjian ini, tanaman yang biasa ditanam yaitu padi. Bagi hasil panen tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang ada serta kesepakatan antar pemilik lahan dengan penggarap. Dalam sistem *maro* ini, pembagian hasil yaitu setengah-setengah, $\frac{1}{2}$ untuk penggarap serta $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan dengan ketentuan pemilik lahan menyerahkan lahan, benih padi, obat-obatan, serta pupuk. Unruk peralatan serta tenaga ditanggung oleh penggarap.

Selanjutnya dalam kerjasama sistem *mertelu*, ketentuan yang berlaku dalam sistem ini sama saja dengan sistem *maro*, hanya saja berbeda dalam pembagian modal serta hasilnya. Dalam sistem *mertelu* pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja. Sedangkan benih, pupuk dan obat-obatan ditanggung oleh penggarap. Pembagian dari hasil panen adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan serta $\frac{2}{3}$ untuk penggarap.

Berikutnya bentuk kerjasama penggarapan sawah yang dipakai di Desa Juntikebon adalah sistem *mercuma*. Berbeda dengan sistem *maro* dan *mertelu*,



umumnya kerjasama ini dipakai oleh petani yang hanya mempunyai keahlian namun tidak memiliki modal. Dalam kerjasama ini, semua kebutuhan menanam mulai dari benih, pupuk dan obat-obatan disediakan oleh pemilik lahan, petani hanya bermodalkan tenaga serta peralatanya saja. Ketentuan pembagian hasil dalam sistem ini yaitu pada panen musim pertama keseluruhan hasil panen adalah milik dari pemilik lahan, sedangkan bagian untuk petani adalah panen pada musim kedua. Sistem kerjasama ini mempunyai resiko dan keuntungan yang besar, namun mengandung unsur spekulasi serta mudah terjadi terjadi kecurangan di dalamnya.

Masyarakat Desa Juntikebon, tak lain bermayoritaskan bermazhab Syafi'i. Mazhab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Dengan kata lain segala sesuatu yang dilakukan baik itu yang bersifat ibadah, muamalah ataupun yang lainnya harus bertumpukan kepada hukum dan aturan syariat Islam terutama kepada konsep aturan mazhab Syafi'i. Dalam hal ini kerjasama penggarapan sawahpun seharusnya mengikuti aturan mazhab Syafi'i.

Berdasarkan uraian serta fenomena tersebut di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan kajian serta penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Kerjasama Penggarapan Sawah dalam Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu)”** guna mengungkap hukum dari praktik kerjasama yang selama ini sering dilakukan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Masyarakat Desa Juntikebon mayoritas bahkan hampir semua bermazhab Syafi'i, yang berarti segala sesuatu hal yang berhubungan syariat Islam harus dilaksanakan menurut aturan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain pula kerjasama dalam penggarapan sawah. Hal ini berlaku untuk semua yang menganut mazhab Syafi'i.

Dalam praktiknya kerjasama penggarapan sawah dengan ketentuan pemilik lahan hanya menyerahkan lahan serta membayar pajak saja, sedangkan segala sesuatunya mulai dari bibit, pengurusan dari awal sampai panen semuanya ditanggung oleh penggarap (petani).



Dalam hal ini ada kesenjangan antara konsep mazhab Syafi'i mengenai kerjasama pengolahan sawah dengan praktik kebiasaan masyarakat yang bekerjasama dalam penggarapan lahan sawah. Namun dalam hal ini ada pertimbangan dari sistem bagi hasil kerjasama tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Ada beberapa bentuk sistem kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon, mulai dari sewa, gadai dan bagi hasil (*maro, mertelu, mercuma*). Selain itu pula ada banyak ulama syafi'iyah yang berbeda pemikiran. Hal tersebut dapat menimbulkan banyak pertanyaan yang pada akhirnya akan memperluas masalah serta memperlebar pembahasan sehingga akan jauh dari tujuan dan harapan dari pembahasan penelitian ini. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan hanya membahas tinjauan hukum dari praktik serta bagi hasil kerjasama penggarapan lahan sawah dalam sistem bagi hasil (*maro, mertelu, mercuma*) perspektif mazhab Syafi'i (studi pemikiran Imam Syafi'i, Taqiyyuddin, Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-Shan'ani, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri, Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuthi).

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

- a. Bagaimana konsep penggarapan sawah dalam perspektif Mazhab Syafi'i?
- b. Bagaimana sistem kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu?
- c. Bagaimana sistem kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu dalam perspektif Mazhab Syafi'i ?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui konsep sistem penggarapan sawah menurut aturan fiqih Mazhab Syafi'i
- b. Mengetahui sistem kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu
- c. Mengetahui bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang praktik kerjasama serta sistem bagi hasil penggarapan sawah yang ada di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian, yakni :

- a. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Perbankan Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalat pada khususnya.
- c. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah kerja sama dalam bidang pertanian, agar masyarakat mampu memahami dengan jelas tentang aturan-aturan kerja sama dalam bidang pertanian, untuk menghindari terjadinya sengketa dimasa yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan yang dilakukan penyusun, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kerjasama pengolahan sawah, diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Barokah Hasanah tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis" yang menjelaskan



tentang pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan tidak memberikan biaya apapun dan tidak menanggung beban apapun, baik itu pupuk, bibit, maupun biaya-biaya lainnya. Namun pemilik lahan mendapatkan bagian separuh dari hasil panen.⁸

Skripsi Ubaidilah tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)”. Skripsi ini membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap konsep bagi hasil dan bagaimana praktik sistem bagi hasil.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Lara Harnita tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat”. Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa lahan pertanian dan upah sewa menyewa tersebut berupa hasil panen serta membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengolahan lahan pertanian tersebut.¹⁰

Skripsi Tabarrut Adi Saputra mengupas tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Waktu penelitian ditinjau dari hukum Islam, dari skripsi ini menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan paron sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, serta cara penyelesaian perselisihan.¹¹

Slamet Widodo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Dalam skripsi yang ditulisnya tersebut saudara Slamet menyimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut mengalami cacat hukum karena mengalami ketidakjelasan waktu berakhirnya perjanjian sebagai syarat shahnya suatu perjanjian, sedangkan

⁸ Barokah Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012) Skripsi tidak diterbitkan.

⁹ Ubaidilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2003) Skripsi tidak diterbitkan.

¹⁰ Lara Harnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012) Skripsi tidak diterbitkan.

¹¹ Tabarrut Adi Saputra, *Perjanjian Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul* (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 1999) Skripsi tidak diterbitkan.



pembagian hasilnya telah memenuhi rasa keadilan sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu di atas, ada yang hampir sama dengan penelitian yang akan penyusun susun, akan tetapi sebagian besar, bahkan semuanya merujuk kepada tinjauan hukum Islam secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun susun, tinjauan hukum lebih di spesifikasikan terhadap pandangan mazhab Syafi'i. selain itu dari sistem kerjasama penggarapan sawah yang dilakukanpun sedikit berbeda dengan sistem kerjasama yang penyusun teliti. Dilihat dari objek/ tempat penelitiannyapun belum ada yang sama yaitu di Desa Juntikebon. Oleh karenanya permasalahan yang muncul juga berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam syariat Islam, segala sesuatu mengenai kerjasama penggarapan sawah telah diatur, mulai dari hukum, aturan, syarat, serta tata cara kerjasama dalam penggarapan sawah. Pada praktiknya sistem kerjasama dalam penggarapan sawah dalam hukum Islam cenderung pada praktik *muzāra'ah* dan praktik *mukhābarah*. Sistem kerjasama *muzāra'ah* adalah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik lahan.¹³ Kerja sama *mukhābarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari pihak penggarap.

Dilihat dari konteksnya *muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah sama yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola. Namun dalam konsepnya terdapat perbedaan yaitu dalam hal modal seperti dalam penjelasan diatas.

¹² Slamet Widodo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang* (Fakultas Suari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2004) , skripsi tidak diterbitkan.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 115.



Muzāra'ah dan *mukhābarah* adalah bagian dari muamalah. Muamalah adalah pergaulan hidup dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Sedangkan kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalah. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalat, yaitu:

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Maksudnya adalah kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalat selalu diperhatikan. Jika ada indikasi pemaksaan dalam akad muamalat maka akad tersebut dianggap tidak sah.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam bermuamalat tersebut, terdapat kebiasaan dan ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat yang disebut adat kebiasaan (*'urf*). *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁴ *'Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf Ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. *'Urf Ṣaḥīḥ* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Adapun *'urf fāsid* adalah adat kebiasaan yang

¹⁴ Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 146.



dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁵

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, maka '*urf*' harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁵

- a. '*Urf*' itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum.
- b. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash

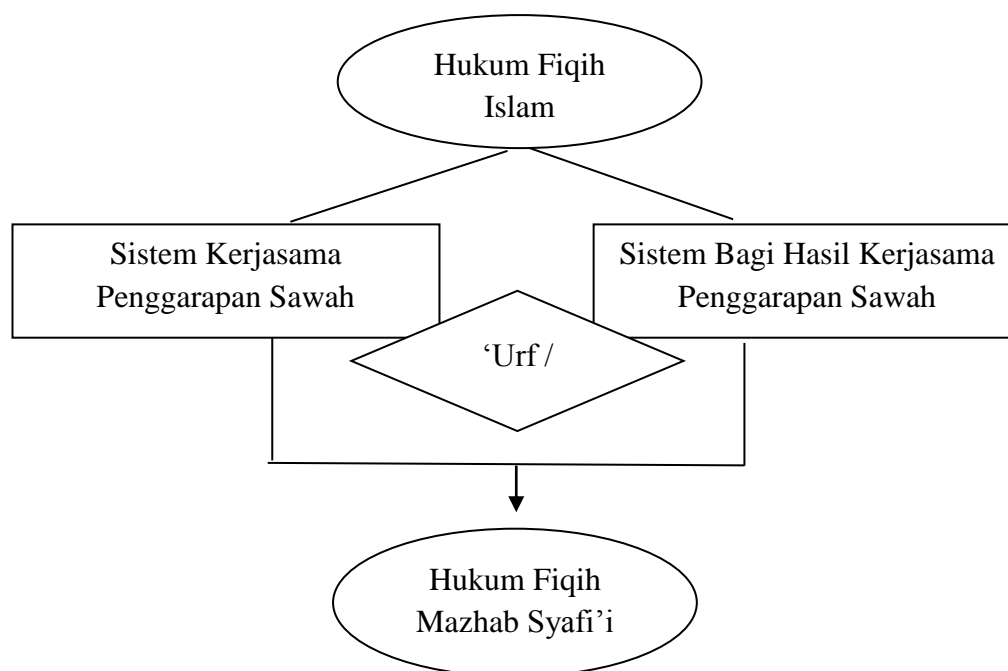
Adat istiadat atau '*urf*' yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara' dapat dikokohkan tetap berlaku bagi masyarakat yang mempunyai adat istiadat tersebut. Oleh karenanya bagi umat Islam, hukum adat setempat masih dapat dipandang berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Dalam pembahasan ini, sistem kerjasama penggarapan sawah diatur oleh aturan hukum fiqih muamalah yang dituntun oleh mazhab yang didalamnya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Dalam praktiknya sistem kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon seharusnya bertumpukan kepada aturan fiqih muamalah mazhab Syafi'i, disamping terinterpretasi oleh hukum adat, hal itu dikarenakan mereka (masyarakat Desa Juntikebon) menganut mazhab Syafi'i. selanjutnya praktik kerjasama penggarapan sawah ini yang telah terinprestasi oleh hukum adat dikaji dan di tinjau menurut perspektif mazhab Syafi'i.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 143-144.



Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran:



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang di tempuh untuk melaksanakan penelitian. Metode yang di gunakan peneliti adalah metode kualitatif, Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistik*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan,

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2

¹⁷ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Trasito.1998), 73

menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁸ Penelitian ini menilai permasalahan mengenai pelaksanaan praktik penggarapan lahan sawah di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu, untuk selanjutnya dianalisis dengan teori-teori *muzāra'ah/ mukhābarah*, kemudian menilai hasil penelitian tersebut apakah sesuai atau tidak menurut tinjauan hukum mazhab Syafi'i.

2. Sumber Data Penelitian

Data adalah bahan mentah yang perlu sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang baik.¹⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keterangan-keterangan hasil wawancara mendalam serta pengamatan yang dilakukan baik dari masyarakat maupun nasabah dari objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang paling utama sebagai sumber yang dianggap terpenting. diperoleh dari data-data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu selama penyusun mengadakan penelitian di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan judul proposal ini sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah :

¹⁸ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54

¹⁹ Victorius dan Aries Susanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Pekalongan : Graha Ilmu, 2011), 54



a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tanpa partisipasi yaitu penyusun tidak terlibat langsung pada obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Dalam hal ini penyusun mewawancarai para pihak yang terlibat dalam akad bagi hasil penggarapan lahan ini, yaitu pemilik lahan sebanyak enam orang dan pihak penggarap sebanyak tujuh orang, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti aparat Desa (sekretaris Desa) dan tokoh agama. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur atau tidak terencana (*open interview*), dalam artian penyusun tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, tetapi penyusun hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan, agar penjelasan dari responden didapat lebih mendalam tentang pelaksanaan *kerjasama parogan* tanpa harus terpaku kepada jawaban-jawaban singkat saja.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁰ Maksud dari dokumentasi ini peneliti mencari sumber-sumber data yang lain selain dengan wawancara dan observasi yang berkaitan dengan kajian yang dibahas dan masih relevan. Sejalan dengan pendapat Riduwan dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian,

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta. Edisi Revisi IV, 1998), 236.



meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian.²¹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²²

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Dilakukan dengan cara menyajikan kata-kata secara deskriptif, bukan rangkuman angka-angka. Sesuai maknanya analisis kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang di susun dalam bentuk teks yang diperluas, untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan.

Proses analisis kualitatif dilakukan melalui “tiga alur terjadi bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan”. Reduksi adalah upaya mengurangi kesimpulan sementara atau melengkapi hasil pengamatan dengan cara pemilihan pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diambil dari catatan tertulis selama peneliti berada di lapangan. Reduksi data langsung secara terus menerus selama pelaksanaan penelitian kualitatif. Proses berikutnya dilakukan penyajian data dengan cara mengklasifikasikan data menurut isu dan kebutuhan secara menyusun sekumpulan informasi dan pengambilan keputusan.²³

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang dilakukan diperlukan suatu analisis data untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan cara berfikir deduktif yaitu sebuah analisis yang berangkat dari

²¹ Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2008), 105.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.

²³ Abdullah Ali, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah* (Cirebon : STAIN Cirebon Press, 2007), 43.



pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan dari penelitian ini, maka di jelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Pada Bab I Pendahuluan, di uraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Dalam bab kedua ini diuraikan mengenai tinjauan umum hukum Islam tentang kerjasama serta bagi hasil pengolahan sawah.

Bab III mengulas bagaimana pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu. Dalam bab ini penyusun mendeskripsikan geografis dan demografi wilayah, pelaksanaan penggarapan lahan yang berisi tentang pelaksanaan penggarapan lahan sawah dan pelaksanaan bagi hasil.

Bab IV adalah inti dari pembahasan, dalam bab ini dipaparkan analisis hukum Islam mazhab Syafi'i terhadap penerapan pelaksanaan kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis pelaksanaan akad, hak dan kewajiban para pihak, cara pembagian hasil dan berakhirnya akad.

Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bab pertama. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.





BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menelaah secara seksama tentang pandangan hukum fiqih mazhab Syafi'i terhadap kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam fiqih Mazhab Syafi'i, ada dua model kerjasama dalam pengolahan sawah yaitu *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. kedua kerjasama ini hampir sama, yang membedakan hanyalah sumber benih/ yang mengeluarkan benih. *muzāra'ah* benih berasal dari pemilik lahan dan *mukhābarah* benih berasal dari petani penggarap. *Muzāra'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah. *Mukhābarah* pun demikian, hanya saja benih/ bibit dari petani penggarap.
2. Ada tiga model kerjasama penggarapan sawah yang di Desa Juntikebon yaitu *maro*, *mertelu*, dan *mercuma*. Ketiga kerjasama tersebut memiliki ketentuan dan proses pelaksanaanya yang sama, perbedaanya hanya dalam pengeluaran modal serta pembagian hasilnya saja. Kerjasama *maro* modal (bibit/ benih, obat-obatan, pupuk) dikeluarkan oleh pemilik lahan dengan pembagian hasil $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ dari hasil panen. Kerjasama *mertelu* modal (bibit/ benih, obat-obatan, pupuk) dikeluarkan oleh petani penggarap dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ dari hasil panen untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ dari hasil panen untuk petani penggarap. Kerjasama *mercuma* modal (bibit/ benih, obat-obatan, pupuk) dari pemilik lahan dengan pembagian semua hasil panen musim pertama untuk pemilik lahan dan panen berikutnya untuk petani penggarap.
3. Pandangan fiqih Mazhab Syafi'i terhadap ketiga kerjasama (*maro*, *mertelu* dan *mercuma*) di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: (a) Apabila dilihat dari segi pelaksanaan akad, ketiga kerjasama

(*maro*, *mertelu* dan *mercuma*) sesuai dengan ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i. (b) Apabila dilihat dari segi pembagian hasil kerjasama *maro* dan *mertelu* dianggap tidak melanggar ketentuan ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i, karenanya kedua kerjasama tersebut diperbolehkan. Sedangkan dalam kerjasama *mercuma* pembagian hasil dianggap tidak adil, karena hasil panen setiap musim tidak pasti sama, terkadang untung dan terkadang juga rugi. Hal ini bisa merugikan salah satu pihak, karenanya kerjasama *mercuma* ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i. Meskipun kerjasama tersebut telah menjadi adat kebiasaan, apabila dikaitkan dengan kaidah fiqih "*Al-Ādatu muhakkamah*" kerjasama *mercuma* tetap tidak bisa dijadikan sebagai suatu hukum yang memperbolehkannya kerjasama tersebut karena tidak sesuai dengan aturan syarat '*urf*' yang bisa dijadikan sebagai hukum. Oleh karena itu kerjasama *mercuma* tidak diperbolehkan. (c) Apabila dilihat dari segi berakhirnya akad, ketiga kerjasama (*maro*, *mertelu* dan *mercuma*) di Desa Juntikebon telah sesuai dengan ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i.

B. Saran

1. Diharapkan bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kerjasama dalam pengolahan sawah, hendaknya selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam serta memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sehingga tidak saling merugikan satu sama lain.
2. Kepada para ulama dan cendekiawan muslim diharapkan untuk selalu meneliti dan menyebarluaskan hukum Islam terutama dalam bidang muamalah sehingga masyarakat mengerti dan sadar bahwa syariat Islam benar-benar menyeluruh dan sempurna serta mengatur segala kehidupan manusia.

